

Faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Program KOTAKU di Kabupaten Klaten (Studi Kasus: Kelurahan Bareng dan Desa Merbung)

Supporting Factors for the Successful Implementation of KOTAKU Program in Klaten Regency (Case Studies: Kelurahan Bareng and Desa Merbung)

Tri Wahyuni^{1*}, Kusumastuti^{1,2}, Candraningratri Ekaputri Widodo^{1,2}

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

²Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi. e-mail: triwahyunirasyid@gmail.com

(Diterima: 5 April 2023; Disetujui: 22 Mei 2023)

Abstrak

Permukiman kumuh merupakan salah satu prioritas nasional menurut UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025. Permukiman kumuh ditentukan dari kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Pemerintah Indonesia menangani permukiman kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU. Keberhasilan dari program KOTAKU dilihat dari ketercapaian tujuan program yang terangkum dalam nilai pada Key Performance Indicators (KPI). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan luasan kumuh terluas di Indonesia, dimana Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di dalamnya yang paling berhasil mengurangi luas permukiman kumuh sebesar 88,7% hingga tahun 2021. Dua kelurahan/desa yang memiliki indeks tercepat dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten ini ialah Kelurahan Bareng dan Desa Merbung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kabupaten Klaten di kedua desa tersebut yang dilaksanakan dengan pola pemugaran. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan teknik analisis skoring. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor pendukung keberhasilan program di Kelurahan Bareng adalah struktur kelembagaan, status legalitas lahan, ketersediaan lahan, karakteristik kebijakan, anggaran, tahapan pelaksanaan program, dan kinerja Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Di sisi lain, faktor-faktor pendukung di Desa Merbung adalah partisipasi masyarakat, struktur kelembagaan, ketersediaan lahan, status legalitas lahan, anggaran, semua tahapan pelaksanaan program, pemeliharaan prasarana, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat.

Kata kunci: Key Performance Indicators; KOTAKU; pemugaran; permukiman kumuh

Abstract

Slums are one of the national priorities according to Law Number 17 of 2007 concerning National Spatial Plan (RPJMN) 2005-2025. Slums are determined from their building condition, neighborhood roads, drinking-water supply, neighborhood drainage, waste water management, solid waste management, and fire protection. The Indonesian government manages slums through the Kota Tanpa Kumuh or KOTAKU program. The success of this program can be seen from the achievement of program objectives which are summarized in the values of Key Performance Indicators. Central Java is the province with the largest slum area in Indonesia, where Klaten Regency is one of its most successful regencies in reducing slum area by 88.7% in 2021. Two villages with the fastest index of reducing slum area in Klaten Regency are Bareng Village and Merbung Village. This study aimed to determine the supporting factors for the implementation of KOTAKU program in the two villages, which were carried out with restoration pattern. This research was conducted using quantitative methods and scoring analysis technique. The results of study revealed that the supporting factors for the success of the program in Bareng Village are institutional structure, land legality status, land availability, policy characteristics, budget, stages of program implementation, and performance of Beneficiary and Maintenance Group (KPP). Meanwhile, the supporting factors in Merbung Village are community participation, institutional structure, land availability, land legal status, budget, all stages of program implementation, maintenance of infrastructure, and implementation of community self-reliance development activities.

Keywords: key performance indicators; KOTAKU; restoration; slums

1. PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2018), permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh merupakan permasalahan krusial yang menjadi perhatian prioritas nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025. Di Indonesia, penanganan permukiman kumuh dilaksanakan melalui program Kota tanpa Kumuh atau KOTAKU. Program KOTAKU merupakan program yang mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 100-0-100, yakni 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Program KOTAKU telah dilaksanakan di 271 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Permukiman kumuh terluas di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Tengah yakni seluas 2.073,38 Ha pada akhir tahun 2021. Kabupaten yang berhasil mengurangi tingkat kekumuhan terluas di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Klaten. Pada tahun 2014, Kabupaten Klaten memiliki luas kumuh 186,41 Ha dan tersisa seluas 21,097 Ha pada akhir tahun 2021.

Penanganan permukiman kumuh oleh program KOTAKU dilaksanakan berdasarkan klasifikasi tingkat kekumuhannya. Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, terdapat empat klasifikasi kumuh, yakni: skor 0-8,75 tergolong bukan kumuh; 8,76-17,50 tergolong kumuh ringan; 17,51-26,25 tergolong kumuh sedang; dan lebih dari 26,26 tergolong kumuh berat. Di Kabupaten Klaten, terdapat dua klasifikasi tingkat kekumuhan berdasarkan data dari baseline program KOTAKU, yakni kumuh ringan dan kumuh sedang. Dalam mengukur keberhasilan, program KOTAKU memiliki suatu alat ukur yang disebut sebagai skor *Key Performance Indicators* (KPI).

Berdasarkan nilai KPI program KOTAKU di Kabupaten Klaten, diketahui bahwa desa/kelurahan yang memiliki keberhasilan tertinggi dalam pelaksanaan program tersebut untuk klasifikasi kumuh ringan adalah Kelurahan Bareng dan untuk tingkat klasifikasi kumuh sedang adalah Desa Merbung. Permukiman kumuh di Kelurahan Bareng dan Desa Merbung ditangani dengan pola penanganan pemugaran. Pada tahun 2014, Kelurahan Bareng memiliki luas permukiman kumuh seluas 28,09 Ha dan memiliki skor KPI 16. Pelaksanaan pola penanganan pemugaran di Kelurahan Bareng dilaksanakan sejak awal program KOTAKU dilaksanakan di Kabupaten Klaten, yakni tahun 2017. Setelah tiga tahun pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Bareng, skor KPI menurun menjadi 3, yang tergolong tidak kumuh, sehingga status kumuh di Kelurahan Bareng sudah hilang. Sementara itu, Desa Merbung semula memiliki skor KPI 20 dan tergolong ke dalam kumuh sedang. Skor tersebut menurun setiap tahun dan pada akhir 2021 turun menjadi 3 sehingga Desa Merbung sudah tidak tergolong kumuh lagi.

Berdasarkan keberhasilan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng dan Desa Merbung melalui program KOTAKU diatas, maka penelitian bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU di Kabupaten Klaten dengan studi kasus di Kelurahan Bareng dan Desa Merbung.

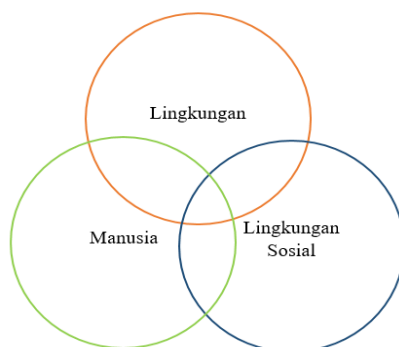
2. KAJIAN TEORI

2.1 PERMUKIMAN KUMUH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka karakteristik permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan perkumpulan perumahan dan permukiman;
- b. Bangunan yang terbangun tidak memenuhi persyaratan, tidak rapi, serta kepadatannya tinggi;
- c. Sarana dan prasarana yang terdapat di kawasan, kondisinya tidak memenuhi persyaratan.

Terdapat tiga aspek yang terkait satu sama lain dalam permukiman kumuh yakni manusia, lingkungan sosial, dan lingkungan tempat tinggal (Prayitno, 2016). Berikut merupakan gambaran keterkaitan antara ketiga aspek yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan Aspek dalam Permukiman Kumuh

2.2 POLA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Dalam buku panduan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP, 2017), terdapat empat klasifikasi kumuh, yakni skor 0-8,75 diklasifikasikan sebagai bukan kumuh; skor 8,76-17,50 diklasifikasikan sebagai kumuh ringan; skor 17,51-26,25 diklasifikasikan sebagai kumuh sedang; dan skor lebih dari 26,26 diklasifikasikan sebagai kumuh berat. Klasifikasi tersebut dilihat dari aspek-aspek permukiman kumuh, yakni kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, dan proteksi kebakaran. Pola penanganan permukiman kumuh dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi tingkat kekumuhan dan status legalitas lahan di suatu kawasan

Pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Wilayah penelitian memiliki status tanah yang legal dan termasuk ke kumuh ringan dan sedang sehingga dilakukan pola penanganan pemugaran. Pemugaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni (Kementerian PUPR, 2018). Definisi pemugaran merupakan upaya perbaikan dan/atau pembangunan kembali agar rumah serta sarana dan prasarana yang terdapat di suatu kawasan permukiman dapat mencapai standar teknis yang berlaku (Pemerintah Republik Indonesia, 2011).

2.3 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Perencanaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi persiapan, pemilihan alternatif, dan pelaksanaan yang dilaksanakan secara logis dan sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat diprediksi dan diantisipasi sebelumnya (Woodburry dalam Setiadi, 2014). Menurut Conyer dan Hill (1984) dalam Kustiawan (2014), perencanaan merupakan upaya untuk menetapkan prioritas sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan tujuan jangka panjang yang ditetapkan. Pembangunan didefinisikan sebagai pemikiran yang harus diwujudkan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan, terdapat dua aspek yang harus diperhatikan (Warpani, 1984), yaitu skala perencanaan dan proses perencanaan. Semakin luas wilayah perencanaan maka perencanaan yang dilaksanakan akan semakin makro dan semakin sempit wilayahnya maka perencanaan akan bersifat lebih detail atau mikro. Dalam proses perencanaan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh dalam proses perencanaan tersebut. Todaro (1986) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pengaruh, pengarahan, dan pengendalian.

Menurut Jhingan (1983) dalam Kadji (2004), keberhasilan suatu perencanaan memerlukan komisi perencanaan, data statistik, tujuan, tahapan pelaksanaan, dan mobilisasi sumberdaya. Riyadi & Bratakusumah (2003) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai proses pembuatan rencana alternatif atau pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan masyarakat, baik fisik (materi) maupun nonmateri (roh spiritual) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal perencanaan. Suatu perencanaan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan proses yang tepat dalam pelaksanaannya (Riyadi & Bratakusumah, 2003).

Dari beberapa sumber tersebut dapat diketahui bahwa proses merupakan salah satu indikator utama dari keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang mana proses tersebut terurai dalam langkah atau tahapan yang dilaksanakan pada sebuah perencanaan.

2.4 PROGRAM KOTAKU

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) memiliki tujuan terkait peningkatan akses pada permukiman kumuh sehingga infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dapat terwujud. Tujuan ini dikembangkan lagi melalui tujuan antara program KOTAKU, yakni:

- a. Luas permukiman kumuh menurun;
- b. Pada tingkat kabupaten/kota terbentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP);
- c. Adanya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat;
- d. Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terdapat di permukiman kumuh mengalami peningkatan akibat tersedianya infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat;
- e. Aturan bersama dilaksanakan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, tahapan merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan. Tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan dalam program KOTAKU meliputi (Ditjen Cipta Karya, 2016):

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah pertama untuk berkolaborasi, penyesuaian visi misi dalam lima tahun ke depan, pemahaman tentang kumuh, dan alasan dari pelaksanaan penanganan kekumuhan. Pada tingkat kabupaten/kota, tahapan persiapan dilakukan dengan:

- Kegiatan tahap sosialisasi awal
Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait tujuan program KOTAKU serta memberitahukan mekanisme dan target penyelenggaraan program tersebut sehingga penyelenggaraannya mendapatkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Rangkaian kegiatan tahap sosialisasi awal ini dilakukan dengan:
 - Melaksanakan lokakarya mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat kelurahan/desa;
 - Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai media sosialisasi;
 - Melakukan rekrutmen relawan penggerak program pada lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi kumuh.
- Pembentukan dan penguatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
Melalui surat keputusan Bupati/Walikota, dibentuk Pokja PKP yang berperan dalam menguatkan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait urusan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh perkotaan. Pembentukan dan penguatan Pokja ini dilakukan dengan:
 - Melaksanakan diskusi mengenai tugas pokok dan fungsi serta rencana kerja dan rencana alokasi anggaran pada kelompok kerja perumahan dan permukiman;
 - Melaksanakan *review* kinerja instansi pada bidang perumahan dan permukiman;
 - Melaksanakan diskusi terkait usulan calon anggota pada Pokja PKP tersebut;
 - Penandatanganan komitmen atau pernyataan dari anggota Pokja PKP untuk melaksanakan tugasnya.
 - Melaksanakan pembahasan terkait kebutuhan pendampingan dari instansi-instansi terkait.

b. Tahap Perencanaan

Perencanaan dilakukan guna menyusun rencana untuk pemecahan masalah serta menguatkan komitmen para *stakeholder* dalam menangani permukiman kumuh. Tahap perencanaan meliputi:

- Pembangunan visi permukiman
Pelaksanaan pembuatan visi permukiman dilaksanakan oleh Pokja PKP dengan para pesertanya terdiri dari OPD terkait, tim teknis, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP), serta masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh tersebut. Visi permukiman ini dibangun dengan:
 - Melakukan *review* dan identifikasi terhadap visi permukiman kota yang sudah ada;
 - Menyepakati visi permukiman kota sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penanganan kumuh.
- Pelaksanaan Refleksi Perkara Kritis (RPK)
RPK bertujuan untuk mengajak masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh untuk berdiskusi tentang ide dan gagasan terkait penanganan permukiman kumuh di kawasan. Kegiatan RPK ini dilaksanakan dengan:
 - Diskusi terkait penyebab kawasan tersebut menjadi kumuh;
 - Mendiskusikan gagasan penanganan permukiman kumuh sehingga visi permukiman perkotaan dapat terwujud.

- Konsolidasi data permukiman kumuh
Konsolidasi data dilakukan dengan melibatkan semua sektor yang terkait dengan penyediaan *baseline* data untuk mengambil keputusan dalam penanganan permukiman kumuh di perkotaan yang dilaksanakan dengan:
 - Pengumpulan data yang bersumber dari berbagai sektor dan aktor terkait permukiman;
 - Melakukan kesepakatan terkait data dasar;
 - Memasukkan data hasil kesepakatan ke dalam sistem informasi kota;
 - Melakukan verifikasi terhadap hasil konsolidasi data kumuh.
 - Penyusunan dokumen RP2KPKP/*Slum Improvement Action Plan* (SIAP)
Dokumen RP2KPKP disusun dengan melalui berbagai tahapan, yakni:
 - Tahap persiapan, yaitu dengan melaksanakan internalisasi Pokja RP2KPKP sebagai langkah awal dalam menyusun Peraturan Walikota/Bupati serta dengan memfasilitasi percepatan penetapan Pokja RP2KPKP;
 - Tahap verifikasi lokasi dilaksanakan dengan melakukan survei lapangan oleh Tim Pokja pada kawasan kumuh dan juga penyepakatan struktur materi Peraturan Walikota/Bupati;
 - Tahap perumusan konsep dan strategi dilaksanakan dengan melakukan pembahasan internal draf Peraturan Walikota/Bupati;
 - Tahap penyusunan desain teknis dilaksanakan dengan pembahasan internal perbaikan draft Peraturan Walikota/Bupati.
- c. Tahap Pelaksanaan
- Pelaksanaan merupakan tahap implementasi yang dilakukan di kabupaten/kota yang meliputi:
- Penganggaran.
Pada tingkat kabupaten/kota, penganggaran dilakukan oleh Pokja PKP yang bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga dokumen RP2KPKP dapat menjadi acuan sebagai pelengkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD dalam setiap pembahasan anggarannya.
 - Pra-konstruksi.
Pemerintah mempersiapkan perencanaan detail infrastruktur untuk infrastruktur primer dan sekunder prioritas yang terhubung dengan sistem infrastruktur di permukiman kumuh. Dalam tahap ini, Pemerintah Kabupaten/Kota mempekerjakan konsultan yang akan menyiapkan *Detail Engineering Design* (DED) infrastruktur tersebut.
 - Konstruksi.
Dalam tahap ini, Pemerintah Kabupaten/Kota merekrut pihak ketiga (kontraktor dan konsultan supervisi) untuk pekerjaan infrastruktur.
- d. Tahap Keberlanjutan
- Tahapan keberlanjutan diartikan sebagai tahapan setelah pelaksanaan lapangan dilakukan yang di dalamnya terdapat tahapan *monitoring* dan evaluasi. Tahap keberlanjutan pada program KOTAKU ialah:
- Penyusunan kerangka regulasi
Penyusunan kerangka regulasi dilaksanakan berdasarkan hasil dari refleksi perkara kritis yang telah dilaksanakan oleh Pokja PKP dan disandingkan dengan kebijakan dan rencana kota dalam penanganan permukiman kumuh. Adapun hasil dari kegiatan ini berupa kebijakan dasar yang akan mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman pada kawasan permukiman kumuh.
 - Pengembangan kelembagaan
Pengembangan kelembagaan ini dilaksanakan dengan melaksanakan penguatan peran dari Pokja PKP mulai dari tingkat persiapan hingga ke tingkat pemeliharaan. Selain itu, dilaksanakan pembagian informasi dan pembelajaran melalui studi banding, *workshop*, dan kegiatan lainnya yang dilakukan untuk para anggota kelembagaan.
 - Pengelolaan *database* dan mekanisme pemantauan pelaksanaan program
Pengelolaan *database* sangat berperan penting dalam pelaksanaan program KOTAKU. Hal ini dikarenakan dengan keberadaan data, maka akan dapat ditentukan pihak-pihak yang terlibat serta strategi yang akan disusun dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman ada permukiman kumuh perkotaan. Selain itu, pemantauan juga dilaksanakan sebagai tahapan yang dilakukan setelah

pelaksanaan program. Mekanisme pemantauan pelaksanaan program ini mencakup pelaksanaan prosedur rutin seperti supervisi dan *review* atas kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Program yang berkelanjutan ialah kapasitas sebuah proyek dalam memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama (Bamberger dan Cheema, dalam Trijunianto, 2016). Operations Evaluation Department, The World Bank, mendefinisikan keberlanjutan sebagai kemampuan sebuah proyek dalam menjaga manfaat yang diterima dan dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (Bamberger dan Cheema dalam Trijunianto, 2016). Menurut Ariyani., et al (2015), keberlanjutan merupakan kemampuan program dalam bertahan, terjaga efektivitasnya, dan memiliki kekuatan untuk berkembang sebagai tolak ukur keberhasilan. Berdasarkan beberapa teori tersebut diketahui bahwa keberlanjutan merupakan suatu faktor penentu keberhasilan dalam sebuah program.

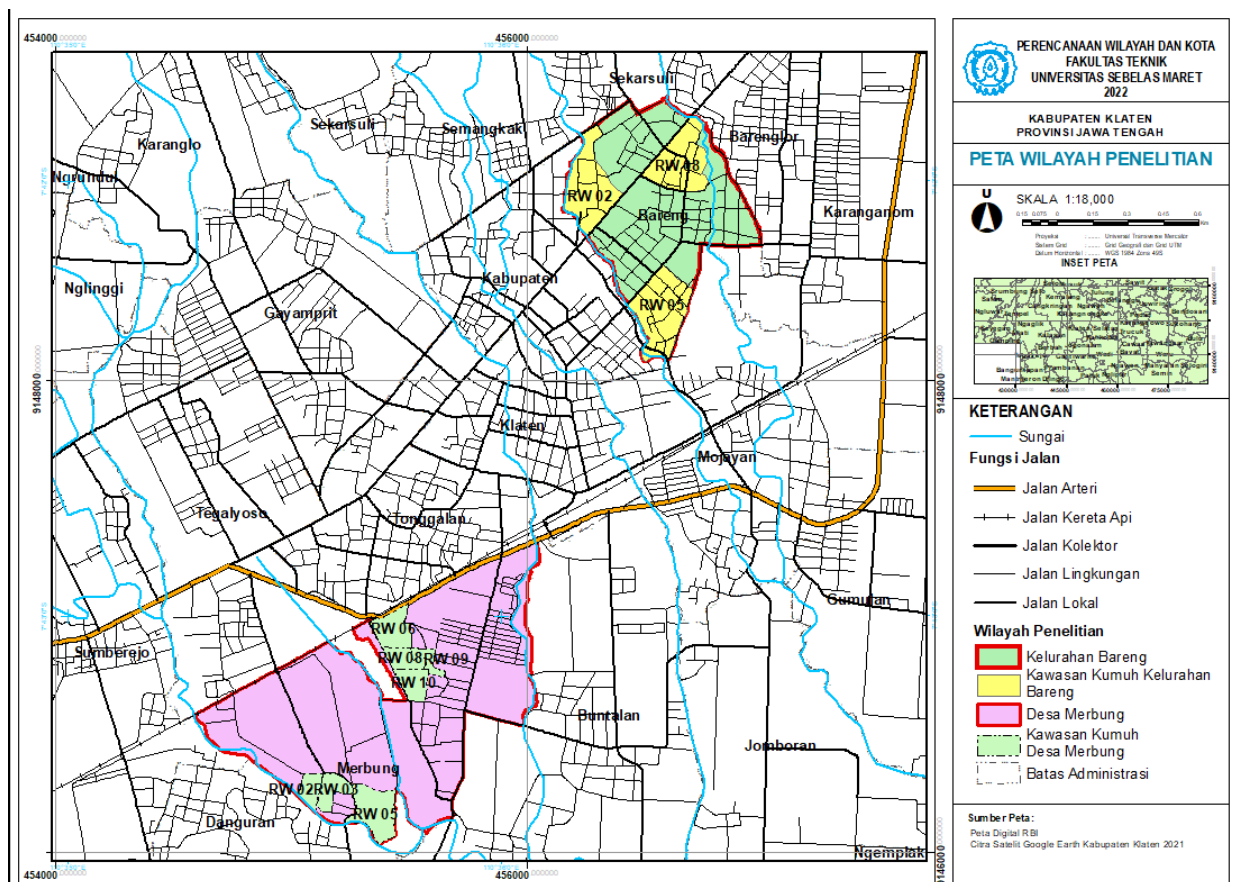
Pada program KOTAKU, tahap keberlanjutan ini dilakukan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara atau KPP. KPP adalah pihak yang mengelola kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan Program KOTAKU. Kinerja KPP dalam kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dinilai berhasil apabila:

- a. KPP melaksanakan pemeliharaan prasarana secara rutin.
- b. Dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang membangun kemandirian masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- c. Pelaporan yang rutin oleh KPP kepada fasilitator kelurahan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 WILAYAH PENELITIAN

Wilayah penelitian berada di dua kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Klaten sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Batasan wilayah ini didasarkan atas data dari *baseline* program KOTAKU terkait wilayah yang paling cepat menurunkan luas kekumuhannya.



Gambar 2. Peta Wilayah Penelitian

3.2 JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deduktif dengan berlandaskan filsafat positivisme dan digunakan dalam penelitian dengan penggunaan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen, dan analisis yang bersifat kuantitatif (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilakukan dengan memahami isu yang terjadi di lapangan melalui konsep umum kemudian dijelaskan pada fenomena yang bersifat khusus. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kuantitatif dikarenakan variabel yang digunakan dapat diukur sehingga data dapat dioperasionalkan dan dianalisis menggunakan statistik.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan observasi lapangan. Diketahui bahwa terdapat tiga jenis wawancara, yakni wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur, dan wawancara semi struktur. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2014), kuesioner merupakan kumpulan pertanyaan ataupun pernyataan yang diajukan kepada responden. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati kondisi permukiman kumuh di wilayah penelitian. Lalu untuk data sekunder, dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen instansi pemerintahan. Data sekunder penelitian ini berasal dari dokumen kebijakan pemerintah, dokumen profil desa/kelurahan, dokumen RP2KPKP, dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), dan dokumen laporan kinerja KPP.

3.4 TEKNIK SAMPLING

Metode sampling yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik sampling dengan penentuan sampel secara sengaja dikarenakan tidak semua orang memahami pertanyaan dan tujuan dari penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah para *stakeholder* yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Program KOTAKU. Selanjutnya, justifikasi pengaruh serta jumlah sampel ditentukan melalui *stakeholder mapping* yang merupakan cara yang digunakan untuk mempertimbangkan penentuan sampel sehingga dapat mewakili populasi yang ada. Pertimbangan digunakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh *stakeholders* terkait pelaksanaan program KOTAKU di wilayah penelitian.

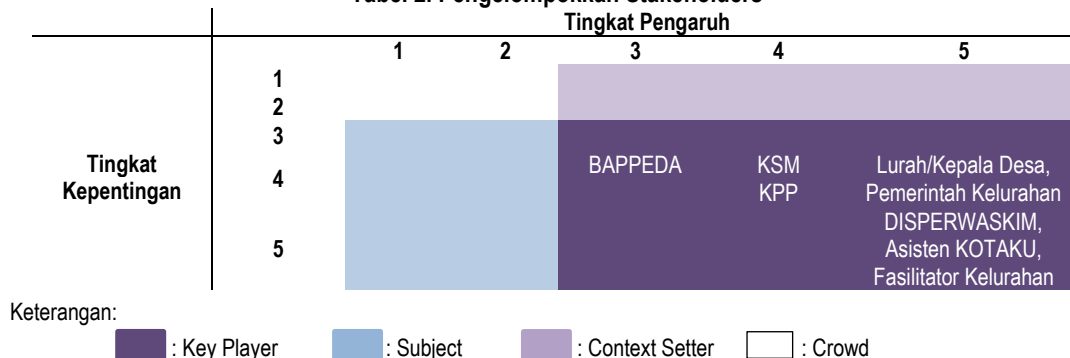
Tabel 1. Tugas Pokok dan Fungsi *Stakeholder*

<i>Stakeholder</i>	Peran <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan Program KOTAKU menurut Surat Edaran Dirjen Cipta Karya	Tingkat Kepentingan	Tingkat Pengaruh
BAPPEDA	- Mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan perencanaan di bidang penataan ruang, lingkungan, prasarana, dan infrastruktur perkotaan; - Selain itu, juga sebagai fasilitator kegiatan KOTAKU pada tingkat kabupaten/kota.	4	3
DPRD	Menentukan legitimasi kebijakan yang dibuat oleh OPD terkait program KOTAKU di Kabupaten Klaten.	2	1
DPUPR	Memberikan bimbingan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman/penataan bangunan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, drainase, serta persampahan.	2	2
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Merumuskan perencanaan teknis, menyusun kebijakan dan penyelenggaraan rumah tidak layak huni, serta melakukan dan menyediakan rekap <i>database</i> rumah tidak layak huni di Kabupaten Klaten.	5	5
DLH	Melaksanakan pengelolaan prasarana persampahan di kawasan permukiman kumuh.	2	2
Dinas Perhubungan	Merumuskan rencana dan melaksanakan perbaikan/peningkatan kualitas jalan pada kawasan permukiman kumuh.	2	2
Camat dan Pemerintah Kecamatan	- Melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pelaksanaan KOTAKU di wilayah kecamatan; - Membina pemerintahan kelurahan/desa serta KSM yang ada;	4	2

Stakeholder	Peran stakeholder dalam pelaksanaan Program KOTAKU menurut Surat Edaran Dirjen Cipta Karya	Tingkat Kepentingan	Tingkat Pengaruh
	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan RPLP menjadi bagian dalam Renstra/Renja Kecamatan; - Melakukan pemasaran sosial kepada berbagai pihak yang terdapat dalam RPLP 		
Lurah/Kepala Desa dan Pemerintah Kelurahan/Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa; - Memfasilitasi pertemuan <i>stakeholder</i> pada tingkat desa dengan pihak KOTAKU; - Berpartisipasi aktif dalam pemetaan permasalahan dan penyusunan dokumen; - Memastikan RPLP menjadi bagian dalam Renstra/Renja kelurahan; - Memastikan adanya alokasi APBDES untuk pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada program RPLP 	4	5
Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>Asisten Kotaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan kolaborasi berjalan efektif serta memediasi penanganan antar sektor/lembaga pemerintahan dan dengan kelurahan/desa yang bersangkutan serta antar kelurahan/desa jika terjadi; - Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kota/kabupaten dengan tingkat kelurahan/desa dan mengkoordinasikan keterpaduan program percepatan pencapaian target 0 ha permukiman kumuh; - Memfasilitasi pelaksanaan forum konsultasi antar SKPD dan multi pihak serta pelaku di tingkat kelurahan/desa dalam setiap tahapan KOTAKU <p>Fasilitator Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan surat pengukuhan RPLP kepada pihak kelurahan/desa; - Mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; - Memberikan bantuan teknis kepada kelurahan/desa dalam setiap tahapan program KOTAKU. 	5	5
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	<ul style="list-style-type: none"> - Menumbuhkan solidaritas serta kesatuan sosial untuk menggalang kepedulian dan partisipasi warga dalam persoalan permukiman; - Bertindak sebagai forum pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut persoalan pelaksanaan program; - Memfasilitasi tahapan kegiatan KOTAKU di tingkat kelurahan/desa; - Berkoordinasi dengan tim fasilitator terkait penyelesaian persoalan dan penanganan pengaduan masyarakat 	4	4
Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan rencana operasional dan pemeliharaan serta pendanaannya; - Menggalang dan mengelola dana untuk operasional dan pemeliharaan yang berasal dari iuran warga, bantuan APBD, APBDES; - Melaporkan kegiatan operasional dan pemeliharaan termasuk penggunaan dana kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan ke masyarakat dan pemerintahan kelurahan/desa. 	4	4

Setelah penentuan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh, selanjutnya dilakukan pengelompokan stakeholder diatas berdasarkan empat karakteristik stakeholder, yakni *key player*, *subject*, *context setter*, dan *crowd* berdasarkan *Power-Interest Grid* yang dikembangkan oleh Aubrey L. Mendelow. Pengelompokan stakeholder ditunjukkan pada TAbel 2 berikut.

Tabel 2. Pengelompokan Stakeholders



Berdasarkan matriks diatas, diketahui bahwa karakteristik stakeholder pada wilayah perencanaan adalah *key player*. Setelah itu, dilakukan penentuan jumlah *stakeholder*. Total responden yang merupakan *stakeholder* dalam pelaksanaan program KOTAKU di wilayah penelitian ini berjumlah 11 narasumber ahli yang memiliki pemahaman dan berperan langsung dalam pelaksanaan program KOTAKU. Narasumber tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3:

Tabel 3. Jumlah Sampel pada Stakeholder

Stakeholder	Jumlah narasumber
BAPPEDA Kabupaten Klaten	1
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
Lurah/Kepala Desa	2
Asisten KOTAKU	1
Fasilitator Kelurahan	2
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2
Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)	2

Penentuan sampel didasarkan bahwa tiap institusi memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda tetapi dalam hal jumlahnya disamaratakan. Penentuan dua sampel untuk tiap *stakeholder* (lurah/kepala desa, fasilitator kelurahan, KSM, dan KPP) disesuaikan dengan jumlah wilayah yang dijadikan kasus dalam penelitian.

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah deskriptif kuantitatif dan skoring dengan skala likert. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengkompilasi dan menjelaskan data yang didapatkan. Analisis skoring digunakan untuk mengetahui tingkat dukungan variabel. Skoring dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, dilakukan skoring terhadap kompilasi data yang didapatkan dari hasil observasi lapangan, studi dokumen, wawancara. Kedua, dilakukan dengan hasil kuesioner dari persepsi dari stakeholder. Penilaian bobot skala likert (Tabel 3.) dalam penelitian ialah: mendukung (3), kurang mendukung (2), dan tidak mendukung (1) dengan perhitungan:

Bobot Likert Max = 3	Rentang / Jangkauan = Max – Min	Interval = Jangkauan/ Banyak Kategori
Bobot Likert Min = 1	= 3-1	= 2/3
Banyak Kategori = 3	= 2	= 0,66

Tabel 3. Klasifikasi Nilai Dukungan

Kategori	Interval Skor	Indeks	Rata-Rata
Mendukung	2,33	< Skor ≤	3,00
Kurang Mendukung	1,66	< Skor ≤	2,33
Tidak Mendukung	1,00	< Skor ≤	1,66

Langkah selanjutnya ialah menjumlahkan dan melakukan rata-rata terhadap hasil skoring atas observasi, studi dokumen, dan wawancara dari narasumber dengan pembobotan skala likert yang telah dilakukan dengan membuat persentase seimbang sehingga diketahui skor yang sangat mendukung 100% dan yang tidak mendukung ialah 33,3%, dengan *range* yang dapat dilihat pada Tabel 4. sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan Persentase Skala Likert

No.	Range	Tingkat Dukungan
1.	66,7% < Skor ≤ 100%	Mendukung
2.	33,3% < Skor ≤ 66,7%	Kurang Mendukung
3.	0% < Skor ≤ 33,3%	Tidak Mendukung

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Bareng dan Desa Merbung, Kabupaten Klaten. Kelurahan Bareng merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Klaten Tengah. Kelurahan Bareng memiliki luas 49,9 Ha yang terbagi atas 9 RW dan 32 RT. Batas administrasi Kelurahan Bareng, yakni:

- Sebelah utara : Kelurahan Barenglor
- Sebelah timur : Desa Karangnom
- Sebelah selatan : Kelurahan Kabupaten
- Sebelah barat : Desa Semangkak

Kelurahan Bareng memiliki penduduk sebanyak 4.359 jiwa yang terdiri atas 2.095 jiwa laki-laki dan 2.264 jiwa perempuan. Pada awal penetapannya, luas permukiman kumuh di Kelurahan Bareng ialah 28,09 Ha yang berada di RW 2, 7, dan 8. Skor permukiman kumuh di Kelurahan Bareng pada awal *Key Performance Indicator* (KPI) penetapannya adalah 16 yang terdapat pada aspek kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran. Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, skor tersebut masuk ke kategori kumuh ringan dan ditangani dengan pola penanganan berupa pemugaran. Pemugaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau membangun kembali perumahan dan permukiman sehingga menjadi layak huni.

Lokasi penelitian selanjutnya ialah Desa Merbung. Desa Merbung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Klaten Selatan. Desa ini memiliki luas 87.48 Ha yang terbagi menjadi 9 dukuh dengan 14 RW dan 41 RT. Adapun batas administrasi Desa Merbung, yakni:

- Sebelah utara : Kelurahan Tonggolan
- Sebelah timur : Kelurahan Buntalan
- Sebelah selatan : Desa Danguran
- Sebelah barat : Desa Sumberejo

Desa Merbung ditempati oleh 991 KK dengan jumlah penduduk 2.910 jiwa yang terdiri atas 1.856 jiwa laki-laki dan 1.964 jiwa perempuan. Desa Merbung merupakan lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Klaten Nomor 050/373/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klaten. Luas total permukiman kumuh di Desa Merbung pada awal pelaksanaan program KOTAKU adalah 16,51 Ha. Pada awal penetapannya, Desa Merbung memiliki klasifikasi tingkat kekumuhan yang sedang dengan skor awal KPI 20 pada kriteria kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran. Kekumuhan dengan kategori sedang pada Desa Merbung ditangani dengan pola pemugaran yang terlihat pada perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman yang dilaksanakan di desa ini.

4.2 IDENTIFIKASI DAN NILAI DUKUNGAN TIAP FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU DI KABUPATEN KLATEN

Tabel 5. Nilai Dukungan Tiap Faktor dalam Pelaksanaan Program KOTAKU

Lokasi	Faktor	Subfaktor	Persentase Observasi dan Wawancara	Persentase Persepsi Stakeholder	Total	Kriteria
Kelurahan Bareng	Kondisi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	66,6%	90,9%	78,75%	Mendukung
		Struktur Kelembagaan	100%	84,8%	92,4%	Mendukung
		Status Legalitas Lahan	100%	100%	100%	Mendukung
		Ketersediaan Lahan	100%	100%	100%	Mendukung
		Karakteristik Kebijakan	66,6%	66,6%	66,6%	Kurang Mendukung
		Anggaran	100%	100%	100%	Mendukung
89,625%			Mendukung			

Lokasi	Faktor	Subfaktor	Persentase Observasi dan Wawancara	Persentase Persepsi Stakeholder	Total	Kriteria
	Tahapan Keberlanjutan Program	100%			Mendukung	
		Pemeliharaan prasarana	100%	100%	100%	Mendukung
		Pelaporan kualitas sarana dan prasarana permukiman	66,6%	66,6%	66,6%	Kurang Mendukung
	Kinerja KPP	Pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat	100%	100%	100%	Mendukung
		88,86%			Mendukung	
Desa Merbung		Partisipasi Masyarakat	66,6%	90,9%	78,75%	Mendukung
		Struktur Kelembagaan	100%	84,8%	92,4%	Mendukung
		Status Legalitas Lahan	100%	100%	100%	Mendukung
	Kondisi Masyarakat	Ketersediaan Lahan	100%	100%	100%	Mendukung
		Karakteristik Kebijakan	66,6%	66,6%	66,6%	Kurang Mendukung
		Anggaran	100%	100%	100%	Mendukung
		89,625%			Mendukung	
	Tahapan Keberlanjutan Program	100%			Mendukung	
		Pemeliharaan prasarana	100%	100%	100%	Mendukung
		Pelaporan kualitas sarana dan prasarana permukiman	66,6%	66,6%	66,6%	Mendukung
	Kinerja KPP	Pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat	100%	100%	100%	Mendukung
		88,86%			Mendukung	

Terdapat tiga faktor dalam pelaksanaan program KOTAKU, yaitu faktor kondisi masyarakat, faktor tahapan keberlanjutan program, dan faktor kinerja KPP. Faktor kondisi masyarakat terbentuk atas beberapa subfaktor, yaitu partisipasi masyarakat, struktur kelembagaan, status legalitas lahan, ketersediaan lahan, karakteristik kebijakan, dan anggaran. Faktor kinerja KPP terbentuk atas beberapa subfaktor, yaitu pemeliharaan prasarana, pelaporan kualitas sarana dan prasarana permukiman, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat.

Partisipasi masyarakat didefinisikan oleh Nurhasanah (2019) sebagai peran serta kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Ia juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi subfaktor pendukung dalam hal pelaksanaan program KOTAKU. Pada Kelurahan Bareng, partisipasi masyarakat kurang mendukung. Hal ini dikarenakan belum semua masyarakat di kelurahan ini yang berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program KOTAKU. Menurut para *stakeholder*, partisipasi masyarakat di kelurahan ini juga kurang mendukung dengan persentase sebesar 66% atau semua *stakeholder* menggolongkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Bareng di kategori dua. Sementara itu, di Desa Merbung, antusias dan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan setiap pelaksanaan program KOTAKU sudah menunjukkan angka yang tinggi. Musrenbangdes yang diadakan rutin setiap enam bulan sekali selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat desa. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program KOTAKU juga dilakukan di desa ini. Hal tersebut juga sejalan dengan persepsi *stakeholder*, yakni sebesar 90,9% menyatakan partisipasi masyarakat yang aktif di desa ini.

Struktur kelembagaan juga menjadi subfaktor pendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU (Rohimat, Rahmawati, & Seran, 2017). Struktur kelembagaan merupakan lembaga yang berkoordinasi dan bekerjasama dalam

pelaksanaan suatu program. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan, struktur kelembagaan di kedua wilayah penelitian menunjukkan hasil yang tinggi sehingga struktur kelembagaan di kedua wilayah penelitian ini mendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU. Berdasarkan hasil wawancara di Kelurahan Bareng, diketahui bahwa kelurahan ini telah memiliki lembaga yang terstruktur dalam upaya pelaksanaan Program KOTAKU. Namun dalam pelaksanaannya, belum semua lembaga tersebut berperan aktif sehingga struktur lembaga berdasarkan hasil wawancara mendapatkan skor dua (kurang mendukung). Namun, pada persepsi *stakeholder*, mayoritas *stakeholder* mengatakan bahwa struktur lembaga di kelurahan ini telah mendukung pelaksanaan program. Setelah dielaborasi, hasil dari wawancara dan persepsi *stakeholders* menunjukkan bahwa struktur lembaga di Kelurahan Bareng masuk ke dalam kategori mendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU. Kelembagaan di kedua wilayah penelitian telah berperan aktif dalam penanganan permukiman kumuh. Di sisi lain pada Desa Merbung, dari hasil wawancara maupun persepsi *stakeholder*, diketahui bahwa struktur kelembagaan di desa ini masuk kedalam kategori mendukung. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga di Desa Merbung telah terstruktur dengan jelas dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat yang telah diberikan.

Menurut Lestari, Alyas, & Tahir (2022), status legalitas lahan dilihat berdasarkan dimana bangunan itu berdiri, dengan status legal atau ilegal. Status legalitas lahan di kedua wilayah penelitian masuk kedalam kategori mendukung dalam pelaksanaan program. Kedua wilayah penelitian telah memiliki kejelasan status yang dibuktikan dengan adanya dokumen atau keterangan status lahan yang sah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Lestari et al. (2022) yang mengatakan bahwa dukungan legalitas lahan berperan dalam pelaksanaan suatu program.

Ketersediaan lahan menjadi subfaktor pendukung dalam pelaksanaan program menurut Lestari et al. (2022). Adanya lahan menunjukkan kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi pada wilayah pelaksanaan program. Pada kedua wilayah penelitian, masih terdapat lahan kosong yang tersedia dan mumpuni untuk dilakukan pembangunan. Dari hasil observasi dan wawancara maupun dari hasil persepsi *stakeholder*, diketahui bahwa ketersediaan lahan di Kelurahan Bareng dan Desa Merbung ini masuk kedalam kategori mendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU.

Subfaktor selanjutnya yang mendukung pelaksanaan program KOTAKU adalah karakteristik kebijakan (Rachma & Widowati, 2020). Karakteristik kebijakan merupakan kejelasan serta keterpaduan peraturan yang dibuat oleh para petinggi dari tingkat pusat hingga di wilayah pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Rachma & Widowati, 2020). Peraturan yang mendasari pelaksanaan program di Kelurahan Bareng telah ada dari tingkat pusat hingga ke tingkat kelurahan sehingga subfaktor karakteristik kebijakan masuk kedalam kategori mendukung di kelurahan ini. Pada Desa Merbung, karakteristik kebijakan masuk kedalam kategori kurang mendukung dikarenakan di desa ini belum terdapat peraturan yang mendasari pelaksanaan program ini.

Subfaktor terakhir yang mendukung pelaksanaan program KOTAKU adalah anggaran (Nurhasanah, 2019). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilaksanakan yang mana pada kedua wilayah penelitian diketahui bahwa kegiatan-kegiatan program KOTAKU telah dilaksanakan secara keseluruhan dan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program ini juga sudah 100%.

Tahapan keberlanjutan dilaksanakan secara terus-menerus setelah masa pra-konstruksi selesai dilaksanakan. Tahap ini terdiri atas penyusunan kerangka regulasi, pengembangan kelembagaan, dan pengelolaan *database*. Kegiatan dalam tahap keberlanjutan yang pertama adalah penyusunan kerangka regulasi. Pada Kelurahan Bareng dan Desa Merbung, penyusunan regulasi dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, KPP, serta masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh di Kelurahan Bareng dan Desa Merbung. Penyusunan kerangka regulasi ini dikoordinasi oleh pihak kelurahan dan juga Pokja PKP serta fasilitator program KOTAKU yang bertugas di kelurahan tersebut. Regulasi yang ditetapkan di desa/kelurahan telah menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh program KOTAKU dan disesuaikan pula dengan kondisi dari lokasi permukiman kumuh sehingga dapat mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman yang sudah ada.

Dalam tahap keberlanjutan ini, dilaksanakan pula pengembangan kelembagaan. Kelembagaan yang dikembangkan yakni lembaga-lembaga yang terdapat di Kelurahan Bareng dan Desa Merbung, yakni Karang Taruna, PKK, LKMK, Posyandu, KPP, serta RT/RW untuk dapat berperan aktif dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman desa/kelurahan. Adapun keluaran dari kegiatan pengembangan kelembagaan ini adalah Kelurahan Bareng dan Desa Merbung memiliki aturan yang mampu secara mandiri melaksanakan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman, adanya inovasi kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman, serta terdapat RPJM Desa yang berorientasi pada pengurangan luasan permukiman kumuh. Dilaksanakan pula pengelolaan *database* pada tahap keberlanjutan dalam program KOTAKU di Kelurahan Bareng sehingga data yang ada selalu diperbaharui.

Megacu Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Program KOTAKU, diketahui bahwa KPP merupakan kelompok masyarakat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan keberlanjutan program KOTAKU. Pernyataan dalam kalimat tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilaksanakan. KPP melaksanakan tiga kegiatan, yakni pemeliharaan prasarana, pelaporan kualitas sarana dan prasarana permukiman, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat. Di Kelurahan Bareng, ketiga kegiatan ini telah dilaksanakan. Pada hasil skoring dan penggunaan skala likert yang dilakukan dalam penelitian, diketahui bahwa ketiga kegiatan dalam tingkat kinerja KPP mendapatkan hasil yang sama, yakni 100%. Kinerja KPP di Desa Merbung mendapatkan skor kurang mendukung pada subfaktor pelaporan kualitas sarana dan prasarana permukiman. Pada subfaktor pemeliharaan prasarana dan subfaktor pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat, Desa Merbung masuk ke dalam kategori yang mendukung.

4.3 PERBEDAAN FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN BARENG DAN DESA MERBUNG

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat perbedaan faktor yang mendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kabupaten Klaten dengan studi kasus di dua lokasi penelitian, yakni di Kelurahan Bareng dan Desa Merbung. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Bareng berdasarkan skor terbesarnya ialah tahapan keberlanjutan, kinerja KPP, dan kondisi masyarakat. Sementara itu, di Kelurahan Merbung, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU berdasarkan skor terbesarnya adalah tahapan keberlanjutan, kondisi masyarakat, dan kinerja KPP. Tabel 6. menunjukkan perbandingan perbedaan skor faktor yang mendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU di kedua lokasi.

Tabel 6. Nilai Perbedaan Faktor pada Kelurahan Bareng dan Desa Merbung

Faktor	Subfaktor	Kelurahan Bareng		Desa Merbung	
		Total Persentase	Kriteria	Total Persentase	Kriteria
Kondisi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	66,6%	Kurang	78,75%	Mendukung
	Struktur Kelembagaan	80,25%	Mendukung	92,4%	Mendukung
	Status Legalitas Lahan	100%	Mendukung	100%	Mendukung
	Ketersediaan Lahan	100%	Mendukung	100%	Mendukung
	Karakteristik Kebijakan	100%	Mendukung	66,6%	Kurang
	Anggaran	100%	Mendukung	100%	Mendukung
	Total	91,14%	Mendukung	89,625%	Mendukung
Tahapan Keberlanjutan		100%	Mendukung	100%	Mendukung
Tingkat Kinerja KPP	Pemeliharaan prasarana	100%	Mendukung	100%	Mendukung
	Pelaporan kualitas sarana dan prasarana permukiman	100%	Mendukung	66,6%	Kurang
	Pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat	100%	Mendukung	100%	Mendukung
	Total	100%	Mendukung	88,86%	Mendukung

5. KESIMPULAN

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu upaya dalam rangka mengurangi perumahan dan permukiman kumuh di Indonesia. Di Kabupaten Klaten, program KOTAKU telah berhasil menuntaskan 165,313 Ha (88,7%) wilayah permukiman kumuh. Berdasarkan data dari *Key Performance Indicators* (KPI) oleh program KOTAKU tahun 2021, diketahui bahwa terdapat dua lokasi kumuh yang paling berhasil mengurangi kekumuhannya di Kabupaten Klaten. Kedua lokasi tersebut adalah Kelurahan Bareng dan Desa Merbung.

Adanya pelaksanaan program KOTAKU berdampak positif bagi kedua desa ini. Program KOTAKU membuat sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang terdapat di kedua lokasi kumuh ini memiliki kualitas yang sesuai dengan standar. Selain itu, kuantitas prasarana yang sebelumnya kurang, ditambahkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah perumahan dan permukiman tersebut melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disusun pada program KOTAKU. Sarana dan prasarana permukiman yang sebelumnya sudah ada pun dirawat dan dijaga pemeliharaannya oleh masyarakat yang tinggal di kawasan dan dikoordinir oleh KPP yang terbentuk di lokasi kumuh ini. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dari sarana dan prasarana perumahan dan permukiman di lokasi kumuh ini berimplikasi pada meningkatnya perekonomian masyarakat yang tinggal di kedua desa dan kelurahan.

Dalam pelaksanaan program tersebut, terdapat faktor-faktor yang menjadi pendukung di kedua lokasi sehingga berhasil mengurangi kekumuhan lebih cepat dibandingkan dengan desa/kelurahan lain di Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil penelitian, di Kelurahan Bareng, faktor-faktor yang menjadi pendukung adalah struktur kelembagaan, status legalitas lahan, ketersediaan lahan, karakteristik kebijakan, tahapan keberlanjutan. Selain itu, terdapat keterlibatan KPP melalui pemeliharaan prasarana, pelaporan kualitas sarana dan prasarana permukiman, hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat juga menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Bareng, Kabupaten Klaten. Sementara itu di Desa Merbung, faktor-faktor paling mendukung keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU adalah struktur kelembagaan, anggaran, partisipasi masyarakat, status legalitas lahan, ketersediaan lahan, tahapan keberlanjutan, pemeliharaan prasarana, serta faktor pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat yang dilaksanakan oleh KPP. Faktor yang kurang mendukung keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU di Desa Merbung adalah karakteristik kebijakan dan pelaporan kualitas sarana dan prasarana permukiman.

Kondisi yang berbeda di kedua lokasi penelitian mengakibatkan adanya perbedaan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU. Faktor-faktor yang mendukung dapat dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam prioritas pelaksanaan program KOTAKU di Kabupaten Klaten. Namun, hal ini juga perlu didukung dengan tidak mengabaikan subfaktor lain sehingga pelaksanaan program KOTAKU di desa/kelurahan di Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan secara komprehensif. Keterlibatan dari semua pihak dan stakeholder diperlukan untuk mengatasi kendala yang terdapat pada faktor dan sub-faktor penunjang sehingga keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU di semua desa/kelurahan di Kabupaten Klaten dapat terwujud dengan lebih cepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada para narasumber yang bersedia meluangkan waktu dan membagi ilmunya sehingga penelitian yang dilaksanakan dapat selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, N., Fauzi, A., Juanda, B., & Bek, I. S., (2015). Evaluasi Pogram Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6(2), 181-197. <https://doi.org/10.22212/jekp.v6i2.347>
- Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. (2017). *Laporan Akhir RP2KPKP Kota Surakarta*. Kota Surakarta: Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
- Ditjen Cipta Karya. (2016). *Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*. Jakarta: Kementerian PUPR. Diakses dari: https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2359/1#div_cari_detail
- Kadji, Y. (2004). *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*. Gorontalo: Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Diakses dari: https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/318/Kemiskinan_dan_Konsep_Teroitisnya.pdf
- Kementerian PUPR. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*. Jakarta: Kementerian PUPR. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104649/permen-pupr-no-14prtm2018-tahun-2018>
- Kustiawan, I. (2014). *Pengertian Dasar, Unsur-Unsur, dan Karakteristik Perencanaan, serta Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota*. Universitas Terbuka. Diakses dari: <http://repository.ut.ac.id/4276/1/PWKL4201-M1.pdf>
- Lestari, A. L., Alyas, & Tahir, M. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone. *Jurnal UNISMUH*, 3(5). Diakses dari: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/9311/5749>
- Nurhasanah. (2019). Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik* 1, 58.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39128/uu-no-1->

tahun-2011

- Prayitno, B. (2016). *Skema Inovatif Penanganan Pemukiman Kumuh*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Diakses dari: <https://onesearch.id/Record/IOS3358.INLIS0000000000000861>
- Rachma, I. N., & Widowati, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2). Diakses dari: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27356/23877>
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Diakses dari: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=2198>
- Rohimat, D., Rahmawati, R., & Seran, G. G. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program KOTAKU/PNPM di Kecamatan Ciawi. *Jurnal GOVERNANSI*, 3(2), 71–80. Diakses dari: [http://repository.unida.ac.id/1499/1/%281%29 ARTIKEL RITA 5.1.pdf](http://repository.unida.ac.id/1499/1/%281%29%20ARTIKEL%20RITA%205.1.pdf)
- Setiadi, H. (2014). *Dasar-Dasar Teori Perencanaan*. Universitas Terbuka. Diakses dari: <http://repository.ut.ac.id/4330/>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Diakses dari: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>
- Todaro, M. P. (1986). *Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode*. Jakarta: Intermedia.
- Trijunianto, O. (2016). *Analisis Faktor Keberlanjutan Sarana Air Minum Program PAMSIMAS di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Institut Teknologi Sepuluh Nopember). Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Diakses dari: <https://repository.its.ac.id/41883/1/9109202407-Theses.pdf>
- Warpani, S. (1984). *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung. Diakses dari: <https://onesearch.id/Author/Home?author=Warpani%2C+Suwardjoko>